

# PARTAI ISLAM SE-MALAYSIA (PAS) DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) SEBAGAI PARTAI ISLAM PENDUKUNG DEMOKRASI PKS PADA PEMILU

Ahmad Ali Nurdin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: nurdinstar@gmail.com

**Abstract:** The article compares the achievement of Partai Islam se-Malaysia (PAS) and Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in the latest general election held in 2013 in Malaysia and in 2014 in Indonesia. The writer finds that the political performance of PAS and PKS has indicated differently contrast results. While political electability of PAS in the 2013 Malaysia's general election has disappointed this party, PKS has successfully proved that surveys held by a number of survey institutes—predicting that the party would cease within the 2014 Indonesia's national election—were totally false. Many political figures of PAS have failed to gain positions in the legislative assembly. Meanwhile, in viewing PKS's political performance during the 2014 national election, one may assume that this party was luckily survive. This is because, a number of surveys conducted before the election had predicted that PKS could be considered lucky when it was able to gain five percent of vote, as its former president has been suspected of being corrupt for his involvement in cows import. However, the fact shows that PKS has not only magnificently survived but it was even able to gain almost seven percent of voters' vote. Unfortunately, PKS was unsuccessful to achieve its political target to be the biggest three of national vote.

**Keywords:** General election; PAS; PKS; Islamic political party.

## Pendahuluan

Telah banyak ditulis oleh para akademisi tentang hubungan antara Islam dan demokrasi. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa Islam tidak kompatibel (*incompatible*) dengan demokrasi. Samuel P.

Huntington misalkan berpendapat bahwa karena demokrasi adalah hasil kontruksi pemikiran Barat, maka demokrasi hanya akan berkembang pada masyarakat yang menganut nilai-nilai Barat.<sup>1</sup> Sementara Sen berpendapat bahwa absennya demokrasi pada masyarakat Muslim disebabkan karena masyarakat ini dipandang sebagai masyarakat yang kurang toleran terhadap kebebasan individu. Dalam kata-kata Sen: ”melihat pengalaman pertarungan politik terutama di Timur Tengah, Islam sering dipandang sebagai agama yang secara fundamental tidak toleran bahkan menjadi musuh bagi kebebasan individu”.<sup>2</sup> Ehteshami juga yakin bahwa masyarakat dan negara Islam telah gagal beradaptasi dengan nilai-nilai modernitas seperti demokrasi.<sup>3</sup> Freedom House’s Index of Political Rights and Civil Liberty (FHIPRCL) seperti dikutip Mujani melaporkan bahwa dalam tiga dekade terakhir, negara-negara Islam umumnya gagal untuk membangun demokrasi politik. Selama periode itu, hanya satu negara Islam yang berhasil menerapkan demokrasi secara sempurna selama lebih dari lima tahun yaitu Negara Mali di Afrika”.<sup>4</sup> Laporan FHIPRCL ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara negara-negara Islam dengan gagalnya demokrasi.

Hanya saja, tidak semua akademisi berpikiran pesimis dan negatif tentang hubungan Islam dan demokrasi. Akademisi seperti Hefner,<sup>5</sup> Esposito dan Voll, tidak sependapat dengan asumsi bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Menurut Hefner, Islam dan demokrasi tidak secara total berseberangan karena nilai-nilai Islam menghargai pluralitas dan toleransi yang merupakan prasyarat lahirnya demokrasi. Esposito dan Voll, sebagaimana dikutip Bukay, berpendapat bahwa negara-negara Islam bisa mengembangkan demokrasi agama (a

---

<sup>1</sup> Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilizations?”, *Foreign Affairs*, No. 72 (1993), 40-41.

<sup>2</sup> Amartya Sen, “Democracy as a Universal Value”, dalam L. Diamond dan M. F. Plattner (eds.) *The Global Divergence of Democracies* (Baltimore and London: John Hopkins University Press, 2001), 15.

<sup>3</sup> Anoushiravan Ehteshami, “Islam, Muslim Polities and Democracy”, *Democratization* 11, No. 4 (Agustus 2004), 91.

<sup>4</sup> Saiful Mujani, “Muslim Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Suharto Indonesia” (Disertasi--Ohio State University, 2003), 1.

<sup>5</sup> Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratizations in Indonesia* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000), 4, 7, 56.

religious democracy) karena dalam kultur Islam bisa ditemukan tradisi diskursus demokratis seperti yang terdapat dalam konsep musyawarah, ijma dan ijtihad. Bahkan Esposito dan Voll berkesimpulan bahwa meskipun kata demokrasi, jarang atau bahkan tidak pernah dipakai dalam term-term agama Islam tetapi praktik demokrasi itu sendiri sudah ada dan dipraktikkan di dunia Muslim.<sup>6</sup> Hanya saja menurut Bukay, sangat disayangkan bahwa ilmuwan Muslim pada umumnya selalu mengikuti pendapat-pendapat ilmuwan Barat tentang isu demokrasi di negara-negara Islam, tanpa melakukan kritik. Bukay bahkan menyesalkan fakta bahwa bukannya para ilmuwan Muslim itu memimpin perdebatan tentang penerapan demokrasi di negara-negara Islam, tetapi malah menguatkan pendapat para ilmuwan Barat dengan cara menggunakan referensi-referensi Barat”.<sup>7</sup>

Berdasarkan perdebatan di atas apakah Islam bertentangan dengan demokrasi atau tidak, artikel ini berusaha melihat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Islam se-Malaysia (PAS) di dua negara yang mayoritas Muslim dan peranan mereka dalam proses demokratisasi. Pembahasan difokuskan dengan membandingkan prestasi kedua partai ini pada pemilu terakhir yang diselenggarakan pada tahun 2013 di Malaysia, dan 2014 di Indonesia. Dengan melihat peran dua partai Islam pada pemilu tersebut, diharapkan pertanyaan apakah di bawah sistem demokrasi, Islam sebagai ideologi selamanya selalu menjadi penghalang dalam sistem politik multi partai atau tidak, bisa dijawab.

Konsistensi PAS dan PKS untuk mengikuti aturan dan prosedur demokrasi bisa dilihat dari terus menerus mereka berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum di negara masing-masing sejak kedua partai ini berdiri sampai pemilu terakhir: Pemilihan Raya 2013 di Malaysia dan Pemilihan Umum 2014 di Indonesia. Pada pemilu ini, penampilan PAS dan PKS cukup berbeda dan kontras. Kalau dukungan kepada PAS pada pemilu 2013 mengecewakan partai ini, sedangkan PKS justru berhasil membalikkan prediksi lembaga-lembaga survei yang menyebutkan partai ini akan gagal total pada pemilu 2014. PAS bukan hanya tidak berhasil mempertahankan suara mayoritas di negara bagian

---

<sup>6</sup> David Bukay, “Can There be an Islamic Democracy?”, *Middle East Quarterly* 14, No. 2 (Spring 2007), 71.

<sup>7</sup> Ibid.

Kedah, tetapi juga gagal mempertahankan perolehan suara yang diraih pada pemilu 2008 di tingkat nasional (Negara Federal). Pada pemilu ini, suara PAS menurun dari 23 kursi parlemen tahun 2008 menjadi hanya 21 kursi pada pemilu 2013. PKS sukses mempertahankan eksistensinya di parlemen dengan meraih suara 6,79% atau 40 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), padahal dalam prediksi beberapa lembaga survei sebelum Pemilihan Umum, partai ini diprediksi tidak akan lolos batas *Parliamentary Threshold* tiga persen. Penjelasan lebih lanjut tentang situasi politik menjelang pemilihan umum di Malaysia dan Indonesia, perolehan suara kedua partai, serta faktor-faktor penyebab naik turunnya suara PKS dan PAS akan dijelaskan di bawah ini.

### **Situasi Politik Malaysia Menjelang Pemilu 2013**

Malaysia melaksanakan pemilu ke 13 pada tanggal 5 Mei 2013. Mengawali proses pemilu, Yang Dipertuan Agung, atas saran dan rekomendasi dari Perdana Menteri Najib Tun Razak membubarkan parlemen pada tanggal 3 April 2013. Selanjutnya Komisi Pemilihan mengumumkan masa nominasi pencalonan anggota parlemen tanggal 20 April. Masa kampanye selama 15 hari dari tanggal 21 April sampai 4 Mei 2013. Pemilu 2013 ini memperebutkan 222 kursi parlemen tingkat nasional dan 505 kursi anggota legislatif negara bagian. Jumlah pemilih 13,2 juta jiwa dan empat puluh persen di antaranya berusia di bawah empat puluh tahun.<sup>8</sup>

Sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu ke 13 ini juga merupakan kontestasi politik antara dua kelompok partai koalisi yaitu koalisi partai penguasa dengan nama Barisan Nasional (BN) dan koalisi partai oposisi bernama Pakatan Rakyat (PR). Ada 13 partai yang bergabung dalam koalisi BN, di antara partai-partai pendukung utama koalisi ini adalah United Malays National Organization (UMNO), Malaysian Chinese Association (MCA), Malaysian Indian Congress (MIC), Malaysian People's Movement (Gerakan). Partai-partai lainnya termasuk People Progressive Party (PPP), Sabah United People's Party (SUPP) dan United Traditional Bumiputera Party (PBB). Sementara anggota koalisi PR di antaranya adalah Parti Keadilan Rakyat (PKR), Parti Islam se-Malaysia (PAS) dan Democratic Action Parti (DAP).

---

<sup>8</sup> Ahmad, ZA dan Sipalan J, "Malaysia Decides on May 5", *The Star*, (April 11, 2013), 3.

Menurut M. Moniruzzaman, kontestasi politik antara dua koalisi besar itu terlihat dengan jelas pada masa kampanye menjelang hari penyoblosan. Moniruzzaman menyebutkan beberapa isu panas yang berkembang selama lima belas hari masa kampanye, di antaranya:<sup>9</sup>

*Pertama*, kampanye didominasi oleh isu-isu ekonomi. Koalisi PR memublikasikan manifestonya yang berkaitan dengan ekonomi lebih cepat dari koalisi BN dengan sebutan Manifesto Rakyat 2013. Dalam Manifesto itu PR menjanjikan kesejahteraan ekonomi dan sosial termasuk perumahan murah, pendidikan gratis, jalan tol gratis, pelayanan WIFI gratis, penurunan harga minyak, gas, minyak goreng, harga mobil dan penurunan harga air dan listrik. Dua slogan populer yang dikampanyekan koalisi oposisi PR untuk menarik pemilih adalah *ubah* (perubahan) dan *inikali lab tukar* (inilah waktu untuk perubahan).

Sementara koalisi BN sebagai partai penguasa juga tidak kalah dengan manifesto PR. BN berusaha mengelaborasi prestasi yang sudah dicapai pemerintah dalam empat tahun terakhir serta mengemukakan rencana-rencana yang akan dilakukan ke depan jika BN terus mendapatkan kepercayaan rakyat untuk memerintah. BN memberi tema manifestonya dengan sebutan 'Rakyat Didahulukan'. Manifesto BN mencakup 19 isu-isu nasional seperti meningkatkan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat urban, pelayanan kesehatan dan transportasi, transformasi infrastruktur pedesaan, pemberdayaan kaum perempuan, pendidikan, keselamatan public, kebebasan dan harmonisasi umat beragama, memerangi korupsi dan perumahan yang layak dan terjangkau. Kedua kelompok koalisi di atas juga membuat manifesto politik di tingkat negara bagian yang menjanjikan perbaikan ekonomi.

*Kedua*, isu yang muncul selama kampanye adalah strategi koalisi oposisi PR untuk memasang elit-elit partai sebagai kandidat dalam memperebutkan kursi di basis pemilih partai koalisi BN seperti di Johor dan di Kawasan Federal (Federal Territory). Contohnya, Lim Kit Siang dari DAP bertanding di Johor melawan petahana yang sudah lama memimpin yaitu Menteri Besar Johor Abdul Ghani Othman. PR bertujuan agar bisa menambah suara di negara bagian Johor, Sabah dan Sarawak yang penduduknya mayoritas China, dengan harapan bisa

---

<sup>9</sup> M. Moniruzzaman, "The 13<sup>th</sup> Malaysian General Election: Uncertainties and Expectations", *Intellectual Discourse*, 21; 1 (2013), 58-60.

mendapatkan suara mayoritas dan membentuk pemerintahan di negara bagian tersebut.

*Ketiga*, dipenuhi isu kampanye negatif. Kampanye negatif anti-partai misalnya dilakukan oleh MCA terhadap DAP, terutama di Johor. MCA secara terus menerus membuat kampanye negatif melawan DAP dan PAS dengan cara membuat iklan di koran-koran besar. Di surat kabar *Daily Star*, MCA membuat iklan lebih dari 30 halaman penuh yang berisi provokasi menyudutkan DAP secara umum dan DAP Johor secara khusus. Tema kampanye dalam surat kabar tersebut di antaranya: “Undilah dengan bijaksana sesuai fakta,” dan kampanye negatif “Memilih DAP berarti memilih PAS,” yang mengandung arti bahwa jika rakyat Johor (mayoritas suku Tionghoa) memilih DAP berarti mereka sama saja dengan menginginkan Johor menjadi seperti negara bagian Kelantan yang menerapkan hukum Islam, miskin dan ditutupnya tempat-tempat hiburan (karena penerapan hukum Islam di Kelantan).

Koran-koran utama berbahasa Inggris juga memuat kampanye politik BN berhalaman-halaman yang menjelaskan suksesnya pemerintah yang berkuasa dalam empat tahun terakhir. Dalam iklan tersebut dijelaskan inisiatif pemerintah dalam perbaikan ekonomi, program transformasi ekonomi serta program-program sukses pemerintah lainnya. Mengambil keuntungan dari publikasi ramalan ekonomi Malaysia yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan internasional yang bonafid, iklan-iklan di surat kabar memuat pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mengagumkan di bawah kepemimpinan partai penguasaan koalisi BN. Di tambah lagi, dua sampai empat halaman iklan di koran dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Domestik yang menjelaskan subsidi untuk rakyat yang diberikan pemerintah pada April 2013 yang mencakup kebutuhan bahan pokok, premium dan solar, minyak goreng, beras, gula dan tepung. Dalam surat kabar juga ditampilkan jumlah subsidi yang diberikan senilai 22.289 milyar ringgit pada tahun 2013 dan 22.261 milyar ringgit pada 2012 yang berarti prestasi signifikan yang dilakukan pemerintahan BN dalam mempermudah kebutuhan ekonomi rakyat. Media juga memunculkan iklan pribadi Menteri Besar Johor Abdul Ghani Othman di bawah judul “My Worry for Johor (kekhawatiran saya terhadap Johor)”.

Isu kampanye lainnya yang cukup hangat adalah isu hukum *hudud* (hukum pidana Islam). PAS dituduh akan menerapkan hukum *hudud* jika mereka berhasil menguasai negara federal Malaysia, yang ditentang oleh DAP. Konflik internal tentang hudud di koalisi PR dengan cepat dimanfaatkan oleh partai koalisi BN. Hal ini juga dijadikan senjata oleh bagian dari partai koalisi BN, terutama MCA untuk menyerang DAP.

Korupsi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan juga menjadi salah satu isu utama dalam kampanye. Koalisi PR menuduh Komisi Pemilihan berpihak kepada BN dengan cara menyediakan tinta pemilihan yang gampang dihapus. Pihak oposisi juga terus menyerang partai penguasa terutama di dunia cyber internet dengan menuduh partai penguasa membawa *bomobs* (dukun) dari Pakistan, Thailand, Afrika dan Indonesia untuk menyabotase pemilu; menuduh bahwa BN menggunakan pesawat Malaysian Airlines untuk membawa para pemilih palsu yang diterbangkan dari Sabah dan Bangladesh. Isu-isu di atas membuat pemilihan umum tahun 2013 ini menjadi sangat menegangkan bagi kondisi politik Malaysia menjelang hari penyoblosan.

### **Hasil Pemilu Malaysia 2013**

Ketika hasil pemilu diumumkan secara resmi oleh Komisi pemilihan, BN mendapatkan kursi mayoritas di parlemen. Dengan jumlah presentasi kehadiran pemilih yang cukup besar 84,5%, BN berhasil mendapatkan 133 kursi dan PR 69 kursi dari total 222 kursi parlemen yang diperebutkan. Sementara di tingkat legislatif negara bagian, BN merebut 275 kursi dan PR memperoleh 230 dari 505 kursi yang diperebutkan. BN berhasil memperoleh suara mayoritas di parlemen dan merebut suara mayoritas di negara bagian Kedah yang pada pemilu sebelumnya (2008) jatuh ke tangan partai oposisi PAS.

Meskipun masih mendapatkan kursi mayoritas di parlemen, BN dianggap menurun popularitasnya. Sebagaimana bisa dilihat dalam tabel di bawah, BN berhasil menyelamatkan 133 kursi dengan 47,38% popularitas pemilih (*popular vote*) dibandingkan dengan 140 kursi dan 50,27% popularitas pemilih pada pemilu 2008. Ini artinya BN kehilangan 7 kursi dan 2,89 persen popularitas pemilih jika dibandingkan pemilu sebelumnya. Sementara PR pada pemilu kali ini mendapatkan 89 kursi dengan 50,87% popularitas pemilih, naik

dibandingkan dengan hasil pemilu sebelumnya yang hanya mendapatkan 82 kursi serta 46,75% popularitas pemilih. Artinya, PR berhasil menambah 7 kursi di parlemen dan meningkatkan popularitas pemilih sebesar 4,12%.

Untuk kursi parlemen, BN menunjukkan kekuatannya di sembilan dari 13 negara bagian yaitu Perlis, Kedah, Pahang, Putrajaya, Melaka, Johor, Labuan, Sabah dan Sarawak. Di Kelantan, Pulau Penang, Kuala Lumpur dan Selangor, koalisi oposisi bertambah kuat. Di Terengganu, Melaka dan Negri Sembilan, BN cukup bagus prestasinya meskipun mendapatkan cukup perlawanan dari oposisi. Di Perak, BN dan PR berimbang kekuatannya.

**Tabel 1:**  
**Hasil Pemilihan Umum Parlemen 2013**

<b>Nama Partai</b>	<b>Perebutan Kursi 2013</b>	<b>Raihan Kursi 2013</b>	<b>Raihan Kursi 2008</b>
<b>BN</b>	221	133	140
UMNO	120	88	79
MCA	37	7	15
Gerakan	11	1	2
MIC	9	4	3
PPP	1	0	0
PBB	14	14	14
SUPP	7	1	6
PRS	6	6	6
SPDP	4	4	4
PBS	5	4	3
PBRIS	1	1	1
UPKO	4	3	4
LDP	1	0	1
SAPP	1	0	2
<b>PR</b>	223	89	82
DAP	51	38	28
PKR	99	30	31
PAS	73	21	23
<b>Independent</b>	79	0	0

Sumber: Diolah dari New Straits Times (7 Mei 2013) dan Komisi Pemilihan Malaysia ([www.spr.gov.sg](http://www.spr.gov.sg))



Jika melihat perolehan partai, berkurangnya jumlah kursi yang diperoleh BN menunjukkan bahwa koalisi partai penguasa berprestasi jelek dalam pemilu kali ini. UMNO, partai politik terbesar dalam koalisi kelihatannya mendapatkan peningkatan jumlah suara. Tetapi hal ini terjadi karena mendapatkan dukungan mayoritas dari pemilih Melayu atau Bumiputera yang ada di Sabah dan Sarawak. Faktanya, adalah Sabah dan Sarawak yang menyelamatkan BN dari kekalahan. MCA, partai terbesar kedua dalam koalisi BN dan representasi suku China penampilannya sangat jelek dalam pemilu 2013. Mereka hanya mendapatkan 7 kursi parlemen dari 37 kursi yang mereka ikut perebutkan. Hal ini menurun jauh dari pemilu 2008, di mana ketika itu MCA berhasil memperoleh 15 dari 40 kursi yang mereka ikut perebutkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih China lebih memilih dan menyukai DAP atau anggota koalisi PR lainnya. Perdana Menteri Najib menyebutnya sebagai 'tsunami kaum China.' Karena pemilu tahun 2013 ini mengindikasikan bahwa orang China kehilangan kepercayaan kepada MCA dan mencari representasi etnik lain sebagai pilihan, atau mereka mengalihkan dukungannya dari dukungan kepada BN berganti menjadi mendukung koalisi alternatif PR.

Begitu juga MIC, partai anggota koalisi BN, tidak berprestasi baik pada pemilu 2013. Mereka hanya mendapatkan empat dari sembilan kursi parlemen yang mereka ikut perebutkan. Anggota partai koalisi BN yang merupakan partai ketiga terbesar dalam koalisi, partai Gerakan, juga kalah dalam pemilu. Mereka hanya mendapatkan satu dari sebelas kursi yang mereka ikut perebutkan. Ini menurun jika dibandingkan pemilu 2008 dengan perolehan dua dari dua belas kursi parlemen yang mereka ikut perebutkan.

Mempertimbangkan buruknya prestasi anggota koalisi BN, kecuali UMNO, adalah fakta bahwa terjadi perubahan dukungan politik kepada koalisi BN. Secara real, MCA, MIC dan Gerakan secara kolektif hanya menyumbang 12 kursi untuk kemenangan 133 kursi koalisi BN, jauh berbeda dengan sumbangan mereka 20 kursi pada pemilu 2008. Karenanya, eksistensi koalisi BN betul-betul sangat tergantung kepada UMNO seorang yang masih bisa bertahan di kalangan pemilih Melayu, sementara koalisi itu sendiri menurun popularitasnya di kalangan pemilih China dan India. Kesimpulannya, eksistensi BN betul-betul tergantung kepada dukungan dari rakyat Sabah dan Sarawak yang

berarti berbahaya bagi keberlangsungan koalisi di masa depan karena partai-partai di dua negara bagian ini bersifat lokal.

### **Prestasi Koalisi Oposisi dan PAS**

Prestasi dan penampilan partai-partai koalisi oposisi PR juga dipandang jelek jika dibandingkan dengan harapan dan target mereka. Koalisi oposisi sebelumnya menyebut pemilu kali ini sebagai *Road to Putrajaya* (Jalan Menuju Putrajaya), karena mereka sangat yakin dan percaya diri bahwa rakyat Malaysia secara umum menginginkan perubahan pemerintahan, dan partai oposisi akan memerintah tinggal di Putrajaya. Hanya saja, melihat hasil pemilu, mereka kecewa karena tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Jika hasil koalisi PR dirinci per-partai, DAP kelihatannya mengalami kenaikan prestasi dari 29 kursi tahun 2008 menjadi 38 kursi, yang diduga karena adanya perubahan dukungan dari pemilih MCA ke DAP. Begitu juga PKR menunjukkan peningkatan jumlah kursi parlemen dari 23 tahun 2008 menjadi 30 pada pemilu 2013, tetapi kursi yang didapat PAS menurun dari 23 tahun 2008 menjadi hanya 21 tahun 2013. Perlu juga dicatat di sini bahwa DAP hampir mendekati target mereka 40 kursi; PKR jauh dari target, hanya 15 dari 45 target perolehan kursi; dan PAS hanya menunjukkan sedikit peningkatan yaitu melebihi setengah kursi yang diharapkan oleh koalisi PR. Hanya saja, tampak jelas bahwa PAS dan PKR tidak didukung oleh mayoritas pemilih Melayu dibandingkan UMNO. Kedua partai PAS dan PKR hanya mampu memperoleh 51 kursi jauh di bawah UMNO yang mendapatkan 88 kursi.

Melihat hasil pemilu di atas, jelaslah bahwa faktor etnis menjadi kunci pola pemilih. Adalah jelas bahwa calon-calon anggota parlemen dari PAS sangat bergantung kepada pemilih etnik Melayu. Di antara 21 kursi yang dimenangkan PAS, 16 kursi mendapatkan dukungan pemilih Melayu 80%, tiga kursi mendapatkan dukungan 64-70% pemilih Melayu, dan dua kursi mendapatkan dukungan pemilih mayoritas Melayu 50-60%. PKR memperoleh keuntungan dukungan mayoritas China atau India atau mayoritas Melayu tetapi dukungan pemilih China yang signifikan.

Terakhir, meskipun jika dilihat dari jumlah kursi meningkat, tetapi secara umum penampilan oposisi PR umumnya dan PAS

khususnya cukup mengecewakan. Banyak tokoh-tokoh politik dari PR termasuk dari PAS gagal mendapatkan kursi di parlemen. Wakil pemimpin spiritual PAS, Haron Didin gagal mendapatkan kursi parlemen, begitu juga Deputy Presiden PAS Mohamad Sabu, Wakil Presiden PAS Husam Musa, mereka kalah bersaing untuk mendapatkan kursi parlemen di tingkat nasional.

Mohamed Nawab bin Mohamed Osman menjelaskan lebih jauh tentang buruknya prestasi PAS pada Pilihan Raya 2013. Menurut Mohamed Nawab<sup>10</sup> bahkan di Kedah, PAS kalah besar pada pemilu 2013. Kegagalan PAS merebut kembali kedah disebabkan karena adanya konflik internal dalam partai Islam ini. Mantan pemimpin ulama PAS di Kedah dalam khutbah Jum'at di sebuah mesjid menyerukan anggota PAS untuk tidak mendukung calon anggota parlemen yang berlatar belakang Shi'ah. Meskipun tidak menyebut nama, seruan itu jelas-jelas merujuk kepada pencalonan Wakil Presiden PAS, Mohamed Sabu sebagai calon anggota parlemen dari PAS. Beberapa ulama (tok guru) pimpinan pondok pesantren di Kedah juga berseberangan dan kecewa dengan penguasa Kedah Azizan Abdul Rozak dari PAS dan akhirnya mendukung calon-calon anggota parlemen dari UMNO. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah kasus Salahudin Yahya, salah satu pimpinan pondok terkenal di Kedah yaitu Pondok Pak Ya. Dia mengintruksikan seluruh santri dan penduduk di daerahnya untuk tidak mendukung calon anggota parlemen dari PAS, Firdaus Jaafar. Inilah salah satu faktor penting, PAS kalah di daerah Jerai, Kedah.

PAS juga berada dalam posisi sulit untuk mendapatkan dukungan di negara-negara bagian selatan seperti Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Meskipun PAS di Malaysia secara umum dipandang sebagai partai yang sudah mengenyampingkan agenda Islamisasi, tetapi rakyat di daerah selatan Malaysia masih menganggap PAS sebagai partai Islam yang berbasis di Kelantan dengan pandangan Islam yang ekstrim dan masih mempunyai agenda Islamisasi di Malaysia. Rakyat Johor misalkan, masih terus memandang Islam-nya PAS sebagai Islam yang tidak moderat dan konservatif. Pandangan ini jelas-jelas membuat dukungan terhadap calon dari PAS menjadi sangat lemah di Johor.

---

<sup>10</sup> Mohamed Nawab bin Mohamed Osman, "Islam, Ethnicity and Political Power: Malay Voting Pattern in the 13<sup>th</sup> Malaysian Election", *RSIS Monograph, The 13<sup>th</sup> Malaysia Elections: Issues, Trends, and Future Trajectories*, No. 30 (2014), 60-61.

Lemahnya dukungan terhadap calon-calon PAS di Johor lebih jauh dijelaskan oleh Mohamed Nawab<sup>11</sup> karena jaringan akar rumput PAS di bagian selatan Malaysia termasuk Johor sangatlah lemah. Contohnya, untuk perebutan kursi parlemen di daerah Pulai, calon dari PAS Salahuddin Ayub, sangat bergantung kepada tim sukses yang justru bukan berasal dari orang-orang asli Johor. Tim sukses PAS diisi oleh orang-orang yang didatangkan dari Kuala Lumpur, Selangor dan Kelantan yang membuat mereka kesulitan untuk meyakinkan rakyat Johor secara politik untuk memilih mereka.

Dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa PAS gagal meyakinkan orang Melayu dan orang Islam tentang posisi mereka sebagai partai Islam yang layak untuk dipilih. PAS harus terus memoles dirinya menjadi partai yang layak dipandang sebagai partai Islam yang modern, moderat dan mampu menjadi *ruling party* di Malaysia. Mereka harus meyakinkan rakyat Malaysia sebagai partai yang bermutu dan menjadi partai alternatif selain UMNO. Para pemimpin PAS juga harus bersatu dan mencatat bahwa orang-orang Malaysia yang mendukung mereka bukan berarti karena mereka mendukung program Islamisasi PAS. Barangkali PAS perlu mengadopsi gerakan civil-Islam yang dipopulerkan oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki. Setelah melihat penampilan PAS pada pemilihan Raya Malaysia 2013, pembahasan selanjutnya akan melihat bagaimana prestasi yang dicapai PKS pada pemilu 2014 di Indonesia

### **Situasi Politik Indonesia Menjelang Pemilu 2014**

Pemilu 2014 merupakan pemilu keempat yang diikuti PKS sejak partai ini berdiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan dua belas partai politik yang bisa ikut bertanding untuk pemilihan anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah ini berarti menurun dari 48 partai politik yang ikut pada Pemilu 1999, menjadi 24 parpol pada Pemilu 2004 kemudian naik lagi menjadi 38 Parpol pada Pemilu 2009. Di antara dua belas partai tersebut, sembilan partai merupakan partai lama yang pada pemilu sebelumnya mempunyai kursi di DPR dan tiga partai lainnya yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sementara Sembilan partai yang sekarang

---

<sup>11</sup> Ibid.

mempunyai kursi di DPR adalah Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Dengan hanya dua belas partai yang ikut bertanding dan hanya empat partai yang bisa dikategorikan sebagai partai Islam, beberapa pengamat politik mengatakan bahwa masyarakat atau pemilih akan lebih mudah melihat dan memperhatikan kebijakan, program dan kader partai yang akan diusung untuk menjadi anggota parlemen. Karenanya, menjelang pemilu dilaksanakan, banyak pertanyaan yang menarik perhatian public untuk bisa dijawab: bagaimana kemungkinan penampilan partai-partai politik Islam termasuk PKS pada pemilu kali ini? Akankah partai Islam terutama PKS mendapatkan dukungan kuat dari pemilih atau justru sebaliknya? Pertanyaan-pertanyaan itu menarik untuk dijawab karena adanya beberapa prediksi dari lembaga survei yang menyebutkan kurang populernya partai-partai Islam pada pemilu 2014.

Survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan bahwa penampilan partai-partai Islam termasuk PKS pada pemilu 2014 akan lebih jelek dibandingkan prestasi mereka pada pemilu sebelumnya. LSI menemukan dalam survei-nya bahwa jika pemilu dilaksanakan hari ini, tidak ada satupun dari partai politik Islam yang masuk lima besar perolehan suara. Bahkan prediksi LSI menyebutkan, tidak akan ada satu partai Islam pun yang bisa mendapatkan dukungan suara lebih dari lima persen.

Lembaga survei lainnya seperti Lembaga Survei Nasional (LSN) memprediksi bahwa tidak hanya dukungan terhadap partai politik Islam yang menurun drastis, tetapi juga dukungan terhadap tokoh-tokoh Islam menurun. Survei LSN menemukan bahwa dukungan terhadap tokoh-tokoh dari partai Islam seperti Hidayat Nur Wahid (PKS), Hatta Rajasa (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB) dan Suryadharma Ali (PPP) sangat rendah jika dibandingkan dengan dukungan kepada tokoh-tokoh nasional yang berasal dari partai nasionalis. Tren di atas menurut Umar S. Bakry (Direktur Eksekutif LSN) menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin bahwa prestasi partai-partai Islam akan terus menurun pada

hari pemilihan 9 April 2014. Beberapa lembaga survei di atas menyebutkan macam-macam alasan yang membuat popularitas partai-partai Islam termasuk PKS terjun bebas di mata pemilih.

Alasan pertama, rakyat Indonesia secara umum ragu dan tidak yakin dengan kapasitas dan kemampuan partai-partai Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa, jika dibandingkan dengan kemampuan partai-partai politik sekuler. Contohnya, dalam menyelesaikan masalah dan kasus korupsi yang menggurita di Indonesia yang merupakan ‘penyakit akut’ yang pertama dan utama harus dipecahkan oleh rakyat Indonesia, tidak bisa diselesaikan oleh partai atau politisi Muslim. Keterlibatan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishak, dalam kasus korupsi sapi, semakin memperlemah keyakinan rakyat Indonesia terhadap integritas partai Islam PKS dalam memerangi korupsi di Indonesia. Penahanan tokoh PKS ini tentu saja akan berpengaruh secara signifikan terhadap popularitas dan elektabilitas PKS pada pemilu 2014. Hanta Yuda, pengamat politik dari Poll Tracking Institute, contohnya mengatakan bahwa PKS pada pemilu 2014 harus mencari isu dan bahan kampanye lain yang ‘seksi’ selain isu anti-korupsi untuk menarik para pemilih, karena publik akan tidak percaya jika PKS dengan lantang sekalipun mengampanyekan diri sebagai partai yang anti-korupsi. Seperti Partai Demokrat yang beberapa kadernya terlibat korupsi, PKS secara otomatis akan diasosiasikan sebagai partai korup paska penahanan Luthfi Hasan Ishak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Senada dengan Hanta Yudha, pemerhati politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan:

“PKS sedang menghadapi krisis eksistensi. Kasus korupsi sapi akan membuat kader dan anggota PKS menjadi disorientasi, yang sebelumnya mereka percaya kepada tokoh-tokoh dan elit partai telah bekerja keras untuk mereka”.<sup>12</sup>

Temuan Lembaga Survei Jakarta (LSJ) yang melakukan survei pada tanggal 9-15 Februari 2013 tak lama setelah Luthfi Hasan Ishak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK menunjukkan bahwa hanya 6,9 persen dari 1.225 responden yang akan memilih Partai Demokrat pada pemilu 2014, dan hanya 2,6 persen yang akan memilih PKS. Menurut Igor, salah seorang peneliti dari LSJ, kasus korupsi sapi yang

---

<sup>12</sup> *The Jakarta Post*, 1 February 2013.

melibatkan mantan presiden PKS mempunyai pengaruh besar terhadap turunnya kepercayaan publik terhadap PKS yang dikenal dengan jargonnya sebagai partai bersih. Hanya 15,7 persen dari responden yang masih percaya bahwa PKS masih merupakan partai bersih, 66 persen tidak percaya dan 18,3 persen responden menjawab tidak tahu.<sup>13</sup> Ditambah lagi, fakta bahwa popularitas partai-partai Islam seperti PKS menurun, juga menunjukkan bahwa fenomena *Islam Yes, Islamic Political Parties No*, sepertinya terus berkembang dan lebih menguat keyakinan seperti ini dikalangan masyarakat Muslim Indonesia. Jika jargon ini yang dipromosikan mendiang Nurcholish Madjid pada tahun 1960 dan 1970an hanya merupakan panggilan moral, jargon ini nampaknya sekarang ini menjadi realitas politik Indonesia. Rakyat Indonesia sekarang nampaknya percaya dan yakin bahwa tidak ada perbedaan antara partai politik Islam dan partai nasionalis dalam memerangi korupsi di negeri ini.

Alasan kedua, partai-partai Islam banyak diketahui orang mempunyai masalah dalam hal keuangan partai. Delapan puluh lima persen responden menurut LSI berpendapat bahwa partai-partai Islam termasuk PKS sangat lemah dalam sumber keuangan dibandingkan dengan partai-partai nasionalis seperti Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra dan Nasdem. Orang akan sepakat berpandangan bahwa partai-partai Islam seperti PKS dan PBB mempunyai modal uang sedikit dibandingkan dengan modal finansial yang dimiliki partai-partai sekuler menjelang pemilihan umum 2014. Alasan ketiga, kasus-kasus radikalisme atas nama agama di Indonesia juga mempunyai kontribusi terhadap penurunan popularitas partai Islam di Indonesia. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan Islam juga membuat 'kekhawatiran kolektif' dan menurunnya popularitas partai Islam termasuk PKS di mata public.

Keempat, partai-partai sekuler atau nasionalis sekarang dipandang lebih akomodatif terhadap aspirasi para pemilih Muslim. Partai-partai sekuler ini telah bertransformasi menjadi partai yang sekuler-inklusif untuk mengakomodasi konstituen Muslim. Para pemilih yang cukup kuat keislamannya sekarang mempunyai pilihan

---

<sup>13</sup> Prayitno Ramlan, Menang di Pilkada Jabar dan Sumut, PKS Masih Hebat atau Tersesat, dalam <http://www.ramalanintelijen.net/?p=6530> (diakses pada tanggal 10 September 2013).

yang lebih luas dan mereka tidak hanya bergantung kepada partai-partai Islam untuk memperjuangkan kepentingan agama mereka. Di samping empat alasan di atas, lemahnya atau tidak adanya tokoh PKS untuk dinominasikan menjadi calon presiden untuk menarik pemilih yang bukan kader PKS, juga merupakan alasan lain mengapa PKS diprediksi para pengamat politik tidak akan mampu menjadi pemenang pada pemilu 2014.

Meskipun pada pemilu 2014, SBY tidak lagi mencalonkan presiden untuk ketiga kalinya (karena memang tidak boleh lagi berdasarkan aturan), bukan hal yang mudah bagi PKS untuk mempunyai tokoh alternatif calon presiden dari kalangan Muslim yang mempunyai popularitas yang tinggi untuk dipilih. Kekalahan Hidayat Nur Wahid pada pemilihan gubernur DKI merupakan contoh konkrit bahwa tokoh utama PKS tidak dipilih dan kalah oleh tokoh nasionalis yang populer seperti Joko Widodo. Jika Hidayat Nur Wahid, telah gagal pada pemilihan gubernur tingkat daerah, orang akan berasumsi bahwa dia kurang populer untuk dicalonkan menjadi presiden oleh PKS.

Faktor pemimpin karismatik dan populer nampaknya masih menjadi faktor signifikan dalam menarik pemilih di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari fakta bahwa Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi gubernur Jakarta tahun 2012. Berdasarkan temuan lembaga-lembaga survei di Indonesia dua bulan menjelang pemilihan legislatif, kita bisa berpendapat bahwa belum ada tokoh populer yang bisa mengalahkan popularitas Jokowi. Artinya, Jokowi diprediksi bisa menggantikan popularitas Yudhoyono yang tidak bisa mencalonkan lagi pada pemilu presiden 2014. Karenanya, adalah pekerjaan yang berat bagi partai-partai Islam seperti PKS untuk ‘menciptakan’ tokoh yang mempunyai popularitas seperti Jokowi mengingat waktu pemilihan yang semakin dekat.

Pengalaman pemilihan Gubernur Jawa Barat juga menguatkan argumen bahwa popularitas figur sangat penting dalam menarik pemilih. Meskipun PKS mengklaim bahwa mereka sukses dalam pemilu local di Jawa Barat karena kadernya Ahmad Heryawan terpilih kembali untuk kedua kalinya, tetapi perlu diingat bahwa ketokohan Heryawan dan mesin politik PKS bukan faktor utama kemenangan. Rakyat Jawa Barat yakin bahwa pencalonan Dede Yusuf sebagai wakil bagi Ahmad Heryawan pada periode pertama terpilihnya Heryawan



merupakan alasan yang signifikan mengapa pasangan Heryawan-Dede Yusuf memenangkan persaingan. Artinya, popularitas Dede Yusuf sebagai actor yang dikenal luas oleh masyarakat menjadi faktor penting keterpilihan Heryawan. Begitu juga, pengusungan Dedi Mizwar (aktor populer senior) sebagai calon wakil gubernur Heryawan untuk periode 2013-2018 juga merupakan salah satu alasan penting mengapa Heryawan terpilih kembali menjadi gubernur Jawa Barat untuk kedua kalinya.

### **Prediksi Tidak Sesuai Realitas**

Jika prediksi lembaga-lembaga survei menempatkan PKS sebagai underdog, dan tidak akan sukses pada pemilu 2014 baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden, pembahasan selanjutnya adalah melihat fakta di lapangan hasil pemilu 2014.

Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara resmi hasil perolehan suara partai-partai peserta pemilu, terlihat jelas beberapa fenomena hasil pemilu yang jauh dan di luar dari perkiraan banyak pengamat terutama lembaga-lembaga survei. Fenomena politik utama yang begitu jelas terlihat adalah kurang meyakinkannya hasil perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meskipun PDIP berhasil menjadi partai pemenang pemilu 2014, tetapi prosentasi kemenangannya yang hanya 18,95 % suara pemilih jelas jauh di bawah target partai ini yaitu 20-30% suara pemilih. PDIP dipandang gagal untuk meyakinkan public meskipun sudah mengumumkan Joko Widodo sebagai calon presiden yang akan diusungnya pada pilihan presiden 9 Juli 2014. Artinya, popularitas Jokowi ternyata tidak berhasil mendongkrak perolehan suara PDIP pada pemilu legislatif 2014. Fenemona kedua, adalah salahnya prediksi lembaga-lembaga survei yang memperkirakan suara parta-partai Islam akan jatuh pada pemilihan anggota legislatif. Jika semua suara partai Islam digabungkan, partai berbasis Islam ini memperoleh dukungan hampir 32%, jauh lebih baik dari hasil pemilihan legislatif pada pemilu 2009.

**Tabel 2:**  
**Prosentase Perolehan Suara Partai Pada Pemilu 2014.**

No.	Nama Partai	Prosentase
1.	Partai Nasdem	6,72 %

2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9,04 %
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6,79 %
4.	PDI Perjuangan (PDIP)	18,95 %
5.	Partai Golkar	14,75 %
6.	Partai Gerindra	11,81 %
7.	Partai Demokrat	10,19 %
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	7,59 %
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6,53 %
10.	Partai Hanura	3,26 %
11.	Partai Bulan Bintang	1,46 %
12.	PKP Indonesia (PKPI)	0,91 %
	<b>Total</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2014 (<http://kpu.go.id>)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada umumnya partai-partai yang berkompetisi pada pemilu 2014 ini grafiknya cenderung naik atau bisa mempertahankan besaran suara yang mereka peroleh pada pemilu 2009 kecuali Partai Demokrat pimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono. Demokrat kehilangan hampir 11 persen suara dukungan jika melihat prestasi mereka pada pemilu 2009. Yang menarik adalah perolehan suara Partai Gerindra yang masuk kategori tiga besar pada pemilu kali ini. Tentu saja, faktor utamanya adalah karena naiknya popularitas ketua Dewan pembina Gerindra, Prabowo Subianto. Prabowo disebut-sebut media sebagai purnawirawan jendral yang tegas dan tidak ragu dalam membuat keputusan, sebagai antitesa dari karakter presiden inkamben Soesilo Bambang Yudhoyono. Gerindra juga disebut-sebut sebagai partai politik yang cukup agresif dalam berkampanye di media termasuk media-media sosial untuk menarik suara pemilih pemula berusia 17 sampai 21 tahun yang diperkirakan berjumlah sekitar 21 juta orang.<sup>14</sup>

Meskipun PDIP dipandang sukses menjadi kampiun nomor satu dalam perolehan suara legislatif, tetapi sebenarnya mereka gagal dalam mencapai target perolehan suara 20-30 persen. PDIP gagal menjadikan pencalonan Jokowi sebagai calon presiden dari partai ini sebagai magnet daya tarik bagi para pemilih. Nampaknya, tenggang waktu yang penyebutan Jokowi menjadi capres PDIP dipandang kurang tepat.

<sup>14</sup> Alexander R. Arifianto, "Unpacking the Results of the 2014 Indonesian Legislative Election", *ISEAS Perspective*, Singapore, (April 2014), 4.

Mungkin jika penyebutan Jokowi sebagai capres PDIP di minggu terakhir menjelang pemilu legislatif, hasilnya akan berbeda. PDIP sudah menyebut Jokowi sebagai calon presiden satu bulan sebelum pemilihan. Hal ini dijadikan masa yang efektif oleh lawan-lawan politik PDIP untuk melancarkan kampanye hitam bagi Jokowi sehingga rakyat ragu-ragu untuk menjatuhkan pilihan kepada PDIP. Kampanye di media cetak dan elektronik juga menjadi kelemahan PDIP ketika mencalonkan Jokowi sebagai capres. Kurangnya penampilan Jokowi di media televisi dan kampanye hitam oleh lawan politik terutama di media-media sosial dianggap sebagai salah satu faktor tidak maksimalnya peran Jokowi dalam menaikkan suara pemilih PDIP.<sup>15</sup>

Sementara untuk partai-partai Islam, hasil pemilu 2014 ini menunjukkan bahwa mereka cukup survive atau bertahan. Prestasi-partai-partai Islam ini termasuk PKS telah membalikkan prediksi lembaga-lembaga survei di Indonesia. Contohnya saja, survei yang dilakukan oleh Koran Kompas dan Lingkaran Survei Indonesia menyebutkan bahwa PKB dan PKS tidak akan mendapatkan dukungan signifikan dalam pemilu. Survei Kompas pada tanggal 9 Januari 2014 menyebutkan bahwa PKB hanya akan mendapatkan dukungan 4,1 sampai 5,1 persen suara pemilih. Padahal dalam realitanya, PKB bisa mendapatkan dukungan dua kali lipat dari prediksi lembaga survei yaitu memperoleh dukungan suara lebih dari 10 persen. Bahkan LSI dalam survei terakhirnya tanggal 2 Februari 2014 menyebutkan bahwa PKS akan menjadi satu di antara empat partai politik yang tidak akan lolos *electoral threshold* tiga persen.<sup>16</sup>

Terakhir, dalam memandang popularitas PKS pada Pemilu 2014, orang bisa beranggapan bahwa mereka cukup bisa bertahan atau *survive*. Jika banyak survei sebelum pemilu dilaksanakan mengatakan bahwa PKS bisa disebut beruntung (*lucky*) jika bisa memperoleh suara lima persen saja, karena ada kasus yang menimpa mantan presidennya dalam korupsi sapi, tetapi faktanya PKS bisa bertahan dan mampu memperoleh dukungan hampir tujuh persen suara pemilih. Meskipun demikian, tentu saja PKS gagal untuk mencapai target yang mereka

---

<sup>15</sup> Josua Gantan and Kennial Caroline Laia, Joko Attack, Poor Marketing, Have Hurt PDIP, *The Jakarta Globe*, 11 April 2014.

<sup>16</sup> Lihat Palupi Annisa Auliani, "Partai Politik Berbasis Islam Menjungkirbalikan Survei, *Kompas*, 10 April 2014.

dengungkan sebelum pemilu bahwa mereka percaya partainya akan masuk tiga besar perolehan suara nasional. Sebelum pemilu, para elit PKS sangat yakin bahwa mereka akan memperoleh dukungan suara yang signifikan. Bahkan presiden PKS mengatakan; Kita cukup percaya diri bahwa dalam empat puluh hari menjelang pemilu, kita akan memperoleh banyak kemajuan. Kita bisa bekerja cukup waktu dan yakin untuk finish pada posisi tiga besar”.<sup>17</sup>

### **Catatan Akhir**

Partisipasi PAS dan PKS pada pemilu 2013 dan 2014 di Malaysia dan Indonesia menunjukkan kepada kita beberapa indikator untuk mengukur komitmen PAS dan PKS menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam mencapai tujuan politik. Pembahasan di atas menunjukkan bagaimana isu-isu politik domestik masing-masing negara menjelang pemilu berpengaruh besar terhadap prestasi perolehan suara PKS dan PAS. Di Malaysia dan Indonesia, pemerintah berkuasa dipandang rakyat sebagai pemerintahan yang gagal dan ada pemimpin oposisi bernama Anwar Ibrahim yang membantu PAS dan partai oposisi lainnya memperoleh dukungan besar dari pemilih. Begitu juga, di Indonesia, pemerintahan petahana SBY dipandang oleh rakyat sebagai pemerintahan yang gagal memerangi korupsi di negeri ini sehingga membuat PKS dan partai-partai lainnya mencari tokoh alternatif seperti Jokowi yang didukung PDIP.

Kesamaan isu seperti korupsi, etnik dan Negara Islam sama-sama ditemukan menjelang pemilu di Malaysia dan Indonesia. Isu ini mempunyai konsekwensi terhadap performance partai politik Islam seperti PAS dan PKS. Di Malaysia isu korupsi yang melanda pemerintahan Najib Razak menguntungkan PAS dalam kampanyenya untuk anti-pemerintahan yang korup, di Indonesia isu korupsi yang melanda tokoh-tokoh PKS seperti kasus korupsi Sapi yang menimpa mantan presiden PKS juga memiliki pengaruh signifikan akan kegagalan PKS menjadi partai yang masuk tiga besar perolehan suara. Berkaitan dengan isu etnik, kedua partai PAS dan PKS mencoba untuk mencitrakan dirinya sebagai partai yang pluralis dalam pemilu. PAS dan PKS berusaha menghindari isu Negara Islam untuk memperoleh dukungan yang lebih besar dari rakyat. Hanya saja, kalau PAS

---

<sup>17</sup> Lihat The Jakarta Post, 2 Maret 2014.

memperoleh keuntungan dari kampanye pluralis ini sehingga masyarakat non-Muslim India tanpa ragu memilih mereka, sementara di Indonesia, kampanye PKS sebagai partai politik pluralis justru merugikan mereka pada pemilu 2014.

Pengalaman PAS dan PKS pada pemilu 2013 dan 2014 ini juga menunjukkan bahwa partai-partai yang mengusung ideologi Islam tidak mampu bersaing dengan partai non-agama kecuali jika partai-partai Islam ini melebarkan isu programnya meliputi isu non-agama seperti isu pemberantasan korupsi dan kesejahteraan rakyat. Kampanye ideologi Islam yang eksklusif nampaknya tidak lagi menarik perhatian pemilih baik itu di Malaysia maupun di Indonesia. Karenanya, partai-partai politik berbasis Islam seperti PAS dan PKS disyaratkan untuk tidak bersifat monolitik hanya menarik pemilih Muslim, tetapi mereka harus pandai-pandai memainkan isu-isu nasional yang berorientasi pada kemakmuran rakyat secara umum bukan hanya pemilih Muslim.

Akhirnya, pemilu 2013 dan 2014 di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa ternyata partai-partai Islam seperti PAS dan PKS yang merupakan fokus dari artikel ini, bisa bertahan dan mengikuti prosedur demokrasi serta mereka bisa dijadikan saluran alternatif untuk menyalurkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

### **Daftar Rujukan**

- Ahmad, ZA dan Sipalan J. "Malaysia Decides on May 5", *The Star*, April 11, 2013.
- Arifianto, Alexander R. "Unpacking the Results of the 2014 Indonesian Legislative Election", *ISEAS Perspective*, Singapore, April 2014.
- Auliani, Palupi Annisa. "Partai Politik Berbasis Islam Menjungkirbalikan Survei", *Kompas*, 10 April 2014.
- Bukay, David. "Can There be an Islamic Democracy?," *Middle East Quarterly* 14, No. 2, Spring 2007.
- Ehteshami, Anoushiravan. "Islam, Muslim Politics and Democracy," *Democratization* 11, No. 4, Agustus 2004.
- Gantan, Josua and Kennial Caroline Laia, Joko Attack, Poor marketing, Have Hurt PDIP, *The Jakarta Globe*, 11 April 2014.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratizations in Indonesia*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000.

- Huntington, Samuel P. "The Clash of Civilizations?", *Foreign Affairs*, No. 72, 1993.
- Moniruzzaman, M. "The 13<sup>th</sup> Malaysian General Election: Uncertainties and Expectations", *Intellectual Discourse*, 21; 1, 2013.
- Mujani, Saiful. "Muslim Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Suharto Indonesia". Disertasi--Ohio State University, 2003.
- Nawab, Mohamed bin Mohamed Osman, "Islam, Ethnicity and Political Power: Malay Voting Pattern in the 13<sup>th</sup> Malaysian Election", *RSIS Monograph, The 13<sup>th</sup> Malaysia Elections: Issues, Trends, and Future Trajectories*, No. 30, 2014.
- Ramlan, Palupi Annisa Menang di Pilkada Jabar dan Sumut, PKS Masih hebat atau Tersesat, dalam <http://www.http://ramalanintelijen.net/?p=6530> (diakses pada tanggal 10 September 2013).
- Sen, Amartya. "Democracy as a Universal Value," dalam L. Diamond dan M. F. Plattner (eds.) *The Global Divergence of Democracies*. Baltimore and London: John Hopkins University Press, 2001.
- The Jakarta Post, 2 Maret 2014.